

JAWABAN TUGAS 3

Rhiza S. Sadjad
NIM 045276176

Fakultas : FHSIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode/Nama MK : **FSSO4205.32/Sosiologi Gender 32**
Tugas : **3**

Pertanyaan 1/2:

Silahkan baca artikel berikut ini yang berjudul “Cerita Buruh Perempuan yang Alami Diskriminasi Gender di Lingkungan Kerja” melalui link <https://news.detik.com/berita/d-3374132/cerita-buruh-perempuan-yang-alami-diskriminasi-gender-di-lingkungan-kerja>.

1. Analisislah **ketidakadilan dan kekerasan gender** dalam dunia kerja sesuai artikel tersebut.
2. Identifikasilah penyebab **perempuan tani** mengalami kemiskinan di Indonesia.

Jawaban 1/2:

1. Jika diperhatikan artikel tersebut ditayangkan di situs berita *Detik.Com* pada hari Minggu, **18 Des 2016** 03:33 WIB, atau kurang lebih hampir 10 tahun yang lalu. Apakah sekarang ini diskriminasi gender di dunia kerja – lebih khusus terkait pelecehan dan kekerasan seksual terhadap kaum perempuan – sudah semakin berkurang atau bertambah? Akhir-akhir ini lebih banyak pemberitaan tentang pelecehan seksual terhadap kaum perempuan di dunia pendidikan, baik pendidikan keagamaan mau pun pendidikan umum, seperti contohnya yang terbaru, misalnya:

<https://news.detik.com/berita/d-8500247/5-dosen-upn-jogja-dinonaktifkan-buntut-kasus-kekerasan-seksual>

yang diberitakan beberapa hari yang lalu, yaitu pada hari Jumat, **22 Mei 2026** 16:11 WIB. Hal ini menunjukkan kenyataan bahwa diskriminasi gender dalam bentuk kekerasan atau pun pelecehan seksual terhadap kaum perempuan di Indonesia masih merupakan masalah besar, dan terjadi di berbagai kalangan, tidak hanya di dunia kerja.

Jika dicermati, maka pada hampir semua kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, hubungan antara pelaku dan korban adalah hubungan atau relasi kuasa (*power relation*), misalnya hubungan antara majikan-buruh, penyelia-pekerja atau atasan-bawahan di dunia kerja, atau antara kiyai-santriwati di pesantren, guru-siswi di sekolah, dokter-pasien di rumah sakit dan ruang praktek privat, serta dosen-mahasiswa di perguruan tinggi. Pelaku pelecehan atau kekerasan seksual – umumnya kaum lelaki - yang memiliki kekuasaan terhadap korban kaum perempuan, merasa dapat menyalah-gunakan kekuasaannya itu semau untuk memenuhi nafsu bejatnya, seolah-olah tidak ada yang mengendalikan atau pun mengawasi.. Sementara korbannya merasa tidak berdaya menghadapinya, seolah-olah tidak akan ada yang akan membantunya atau menolongnya pada situasi semacam itu. Oleh karena itu, untuk mencegah agar kasus-kasus diskriminasi gender –

khususnya yang berupa pelecehan atau kekerasan seksual terhadap perempuan – tidak semakin meluas, maka di tempat-tempat di mana terdapat relasi kuasa kaum lelaki terhadap kaum perempuan, pengawasan harus diperketat dengan berbagai cara, misalnya dengan memasang kamera pengawas (CCTV) di tempat-tempat rawan, serta memberikan ancaman sanksi yang berat bagi para pelaku, dituliskan besar-besarnya sehingga setiap saat selalu terbaca. Kepada kaum perempuan yang rentan menjadi korban perlu secara berkala diberikan edukasi tentang berbagai kiat untuk menghindari perbuatan-perbuatan semacam itu, serta mengenali – sebelum terlambat – bagaimana ciri-ciri gerak-gerik kaum lelaki yang memiliki kuasa atas mereka yang menjurus ke perbuatan pelecehan atau kekerasan seksual. Intinya, kaum lelaki yang berpotensi menjadi pelaku karena memiliki kekuasaan, harus selalu merasa diawasi sehingga tidak bisa berperilaku sembarangan, sedangkan kaum perempuan yang berpotensi menjadi korban, harus selalu merasa aman dan tidak merasa dalam posisi tidak berdaya dalam situasi apa pun yang dihadapi.

Selain di tempat-tempat di mana terdapat relasi kuasa kaum lelaki terhadap kaum perempuan, berbagai tempat lainnya ditengarai berpotensi terjadi pelecehan atau kekerasan seksual, seperti di jalan-jalan sepi pada malam hari, atau di tempat-tempat keramaian ketika terjadi kerumunan (*crowd*) yang berdesak-desakan. Untuk tempat-tempat seperti itu, pengawasan harus lebih ditingkatkan, atau dibuat pemisahan yang aman, seperti gerbong khusus perempuan dalam rangkaian KRL.

2. Walau pun dalam artikel tersebut di atas tidak secara spesifik membahas tentang diskriminasi gender di lingkungan kerja pertanian terhadap petani atau buruh tani perempuan, ada kemungkinan kemiskinan kaum tani-lah, khususnya perempuan tani, yang kemudian mendorong mereka meninggalkan kawasan pedesaan ber-urbanisasi ke wilayah industri di perkotaan, menjadi buruh perempuan dan mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, seringkali tanpa mereka sadari atau pahami sebagai diskriminasi gender, karena terjadi “normalisasi”, sesuatu yang dianggap “biasa”.

Permasalahan tentang perempuan tani (*peasant women*) di kawasan pedesaan dibahas dalam (Ref. [1], Modul 06, *Kegiatan Belajar 2 B*, hal. 6.23 – 6.27) yang dikaitkan langsung dengan masalah kemiskinan. Akar permasalahan kemiskinan perempuan tani di pedesaan boleh jadi karena kuatnya tradisi dan budaya patriarkhi, yang terwujud antara lain dalam bentuk (1) pewarisan kepemilikan lahan yang tidak setara antara kaum lelaki (mendapat lebih banyak) dan kaum perempuan, (2) kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang di-dominasi oleh kaum lelaki serta (3) perbedaan akses ke sumber-sumber keuangan. Yang terakhir ini dicoba diatasi oleh peraih hadiah Nobel dan pemimpin Bangladesh, **Muhammad Yunus** [1940 -], dengan mendirikan *Grameen Foundation* untuk pemberdayaan finansial, khususnya kaum perempuan. Padahal pada kenyataannya, dalam masyarakat di wilayah pedesaan, kaum perempuan tani lah yang aktif bekerja

di lahan persawahan, dari mulai menanam sampai panen - hanya pekerjaan mengolah lahan saja yang dikerjakan oleh kaum lelaki – kaum perempuan juga yang berperan sebagai pemasok dan penjual di pasar-pasar tradisional, serta tentu saja kaum perempuan juga yang berperan mengurus rumah tangga. Pada masa sekarang ini, bahkan perempuan tani-lah yang lebih banyak meninggalkan kampungnya menjadi pekerja industri di pabrik-pabrik di wilayah perkotaan, juga bekerja sebagai asisten rumah tangga bahkan sampai ke mancanegara. Dalam (Ref. [2], Chant (2003)) disebutkan fenomena kemiskinan dan diskriminasi gender sebagai “feminisasi kemiskinan”. Istilah ini bukan berarti mengatakan bahwa mayoritas orang miskin adalah perempuan, atau mayoritas perempuan adalah orang miskin, tetapi lebih menyatakan terjadinya semacam lingkaran tertutup: kaum perempuan lebih terdampak oleh kemiskinan daripada kaum lelaki, dan mengalami diskriminasi gender dalam upaya ke luar dari kemiskinan itu, sehingga semakin lama semakin terjatuh dalam jurang kemiskinan.

Situasi dan kondisi akhir-akhir ini tampaknya sudah banyak berubah, terutama di Pulau Jawa. Fenomena aglomerasi kota-kota menghasilkan megapolitan kota-kota besar, sehingga lahan pertanian semakin sempit, banyak yang mengalami konversi lahan, menjadi kawasan perumahan dan kawasan industri. Perempuan tani kehilangan mata-pencariannya di pedesaan sehingga menjadi pekerja migran, sebagai buruh industri atau asisten rumah-tangga di kota-kota besar, bahkan ke manca-negara. Walau pun belum tersedia data yang akurat tentang berapa banyak perempuan tani yang berhasil terentaskan dari kemiskinan dengan beralih “profesi” dari perempuan tani menjadi pekerja migran, tapi pengamatan sepiantas menunjukkan kecenderungannya semakin hari semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sempat terhenti sejenak selama masa pandemi COVID-19 [2020-2023], tapi pada saat ini sudah meningkat kembali. Bukan mustahil pada masa yang akan datang, perempuan tani yang bergulat dengan kemiskinannya, tinggal menjadi kenangan masa lalu.

Pertanyaan 2/2:

1. *Identifikasilah peluang dan kendala perempuan dalam keterlibatannya dalam anggota legislatif.*
2. *Analisislah apa yang menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam parlemen.*
3. *Tuliskan salah satu mitos pendidikan terhadap anak dan perempuan, lalu analisislah dampak dari mitos itu bagi perempuan dalam masyarakat.*

Jawaban 2/2:

1. Peluang dan kendala kaum perempuan (Indonesia) dalam berpolitik, khususnya menjadi anggota legislatif sebagai puncak karier politisi, dibahas tuntas dalam (Ref. [1], Modul 07, *Kegiatan Belajar 1*, hal. 7.4 – 7.13). Salah satu peluang besar yang diberikan kepada kaum perempuan Indonesia dalam berpolitik adalah ditetapkannya *quota* minimal sepertiga calon legislatif yang

diajukan oleh partai politik sebagai suatu *affirmative action*. Sementara untuk jabatan-jabatan publik lainnya, dari mulai tingkat Ketua RT/RW, Lurah, Camat, Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri sampai ke jabatan politik tertinggi, yaitu Presiden, terbuka peluang yang sebesar-besarnya untuk kaum perempuan Indonesia untuk ber-kompetisi secara *fair* dengan kaum lelaki., baik melalui pemilihan mau pun melalui mekanisme mobilitas karier vertikal lainnya. Kaum perempuan Indonesia juga lebih beruntung dari kaum perempuan di negeri-negeri lainnya, termasuk di negeri-negeri maju, karena hampir tidak ada kendala dalam menempuh pendidikan (kecuali karena berbagai mithos di dunia pendidikan, lihat jawaban Pertanyaan 2/2 #3) dan menjamurnya berbagai organisasi kemasyarakatan yang didirikan khusus untuk perempuan, baik sebagai organisasi *counter-part* dari organisasi induk yang di-dominasi kaum lelaki (seperti *Aisyiyah*-nya *Muhammadiyah*, atau *Fatayat*-nya *Nahdlatul Ulama*) mau pun yang berdiri sendiri sebagai organisasi kaum perempuan seperti *Salimah*, *IWAPI*, dan masih banyak lagi. Organisasi-organisasi yang kebanyakan berkiprah dalam kegiatan di sektor pendidikan dan sosial-kemasyarakatan ini membuka peluang sebagai jalur politik untuk kaum perempuan yang memang berminat untuk terjun ke dunia politik. Dunia usaha di Indonesia – khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) – juga di-dominasi oleh kaum perempuan. Pada momen-momen tertentu, kaum perempuan yang tergabung dalam kelompok-kelompok “*emak-emak*”, pengajian dan *Majlis Taklim*, bisa digerakkan menjadi kelompok penekan (*pressure group*) dan bisa dikerahkan untuk turun ke jalan menggelar aksi protes atau menyalurkan aspirasi mereka, mewakili masyarakat luas.

Sejak awal kemerdekaan, bahkan sebelumnya, proses demokratisasi di Indonesia memang seiring- sejalan dengan perjuangan pemberdayaan kaum perempuan (Ref. [3], khususnya Blackburn (2004)). Bandingkan dengan kasus Amerika Serikat, misalnya, yang sudah menyatakan merdeka sejak tahun 1776, tapi hak kaum perempuan untuk memilih dan dipilih, baru diberikan tahun 1920, hampir 150 tahun kemudian. Perlu waktu satu setengah abad sejak merdeka bagi kaum perempuan di Amerika Serikat untuk memperoleh hak partisipasi dalam politik. Di Indonesia sama sekali tidak seperti itu, tapi tetap saja kaum perempuan Indonesia kebanyakan tidak terlalu berminat untuk terjun ke dunia politik. Walau pun diberikan contoh inspiratif tidak kurang dari seorang **Megawati Soekarnoputri** [1947 -] dan puterinya **Puan Maharani** [1973 -], kaum perempuan Indonesia pada umumnya berpandangan bahwa mereka itu memang “istimewa”, atau tidak “umum”, karena ditakdirkan menjadi puteri dan cucu **Soekarno**, pendiri bangsa, proklamator dan Presiden pertama. Politik dinasti memang berkembang, apalagi sesudah memasuki era Reformasi, sehingga timbul kesan yang sangat kuat bahwa jika kaum perempuan Indonesia terjun ke dunia politik, maka mereka ber-karier bukan karena kompetensi dan prestasi yang mereka raih, melainkan karena mereka bagian dari suatu dinasti keluarga tang (pernah) berkuasa. Meritokrasi dalam upaya

meraih jabatan publik memang tidak berkembang dengan baik di Indonesia. Dan ini tentunya bukan kesalahan kaum perempuan semata.

Kendala-kendala lain yang dihadapi kaum perempuan untuk meniti karier dalam bidang politik, selain budaya patriarkhi yang masih sangat kuat di masyarakat Indonesia pada umumnya, juga kendala-kendala “teknis” seperti beban dan peran ganda sebagai perempuan karier dan ibu rumah-tangga, serta biaya kampanye dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang sangat besar. Masalah-masalah seperti ini tidak saja merupakan kendala bagi kaum perempuan di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, sebagaimana dibahas lebih jauh dalam (Ref. [3], Paxton & Hughes (2015)).

2. Walau pun telah diberikan peluang kepada kaum perempuan untuk mengisi sepertiga dari daftar calon legislatif yang diajukan oleh partai politik, pada akhirnya anggota parlemen di Indonesia yang terpilih tetap saja di-dominasi oleh kaum lelaki. Dan ini sepertinya berlaku global di seluruh dunia, dengan sedikit perkecualian - agak lebih banyak dari yang lain, lebih dari sepertiga – di negara-negara dekat kutub utara (negara-negara Skandinavia), seperti terungkap dalam Tabel 7.3 dan Tabel 7.4, (Ref. [1], Modul 07, *Kegiatan Belajar 2*, hal. 7.17). Kaum perempuan di Indonesia memang menghadapi berbagai kendala sebagaimana diuraikan dalam jawaban dari Pertanyaan 2/2 #1 sebelumnya, yaitu antara lain: (1) politik dinasti, (2) tidak berkembangnya meritokrasi, dan (3), kendala-kendala “teknis” seperti masalah peran ganda sebagai ibu rumah-tangga dan perempuan karier, serta biaya kampanye yang sangat besar dalam proses pemilihan umum.

Selanjutnya ada pula kendala yang dihadapi kaum perempuan Indonesia sehingga kurang ber-partisipasi di parlemen, yaitu kendala berupa masih kuatnya norma-norma budaya patriarkhi. Rendahnya partisipasi kaum perempuan dalam parlemen, bukan sekedar disebabkan oleh ketidak-mampuan atau tidak adanya minat, tapi lebih banyak karena kendala yang bersifat struktural, kultural, dan psikologis, akibat masih mengakarnya patriarkhi di masyarakat umum. Misalnya ada semacam tuntutan dari masyarakat agar kaum perempuan bersikap lemah-lembut, menjaga keharmonisan dalam hubungan dengan orang lain, bersikap elegan dan sederhana, tidak berlebihan, dan yang semacam itu, yang sejatinya sulit diperankan oleh seorang politisi yang dengan lantang menyuarakan aspirasi masyarakat yang diwakilinya di parlemen. Muncul anggapan bahwa politik adalah ranah laki-laki, karena politik itu “kotor” dan “sangat”, banyak hal-hal yang tidak patut dan tidak layak untuk kaum perempuan. Ada pula semacam “*stereotyping*”, bahwa kaum perempuan itu emosional, tidak stabil dan tidak rasional, sehingga akan sulit menahan diri jika terjadi perdebatan politik yang memanas di parlemen.

Terakhir, yang menyebabkan kurangnya partisipasi kaum perempuan di parlemen adalah kendala institusional dari kalangan partai-partai politik peserta Pemilihan Umum Legislatif. Tidak

ada partai politik yang khusus untuk perempuan, padahal banyak organisasi kemasyarakatan yang mengkhususkan keanggotaan dan kegiatannya untuk program-program sosial-ekonomi pemberdayaan kaum perempuan. Jadi tidak ada sarana-prasarana pendidikan politik untuk kaum perempuan, sehingga seandainya pun mereka didaftarkan sebagai calon legislatif, tujuannya hanya sekedar untuk memenuhi quota. Tidak ada upaya sungguh-sungguh dari partai-partai politik untuk memberdayakan kaum perempuan. Bagi partai-partai politik di Indonesia, per-politik-an adalah ranah kaum lelaki, bukan ranah-nya untuk kaum perempuan.

3. Sebagaimana realitas di dunia kerja, di kalangan perempuan tani di pedesaan dan di dunia politik, di dunia pendidikan pun realitas gender berakar pada masih kuatnya budaya patriarkhi dalam masyarakat Indonesia, sebagaimana dibahas dalam (Ref. [1], Modul 08, *Kegiatan Belajar 1 B*, hal. 8.9 - 8.11). Budaya ini menimbulkan mithos-mithos yang mempengaruhi perkembangan anak didik, sebagaimana dipaparkan dalam (Ref. [1], Modul 08, *Kegiatan Belajar 1 C*, hal. 8.11 – 8. 15). Lebih jauh, diskusi terkait diskriminasi gender dalam bidang pendidikan dibahas dalam (Ref. [4], khususnya Giroux & Penna (1979), dan khusus untuk Indonesia referensi utama-nya adalah (Ref. [4], Suryakusuma, J. (2011)) .

Ada banyak mithos terkait dengan peranan kaum perempuan di Indonesia yang mempengaruhi dunia pendidikan. Pada jaman dahulu misalnya ada mithos bahwa kaum perempuan kalau terlalu tinggi sekolahnya akan sulit mendapatkan jodoh, karena tidak ada yang berani jadi suaminya. Mithos ini tentu menghambat kaum perempuan untuk menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya, dan hambatan terbesar datang dari orang-tua yang khawatir anak perempuannya tidak dapat jodoh, menjadi perawan tua, yang dianggap “musibah” oleh keluarga di Indonesia. Tapi mithos seperti ini hanya ada di wilayah pedesaan, tidak ada lagi di wilayah perkotaan yang sudah ter-industrialisasi. Mithos-mithos yang lebih kekinian misalnya tentang kaum perempuan yang tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga, sedangkan kaum lelaki ke luar mencari nafkah (dipatahkan oleh pekerja migran perempuan yang pergi jauh sampai ke manca negara untuk mencari nafkah), atau tentang kaum lelaki yang harus menjadi kepala keluarga (dalam sistem kependudukan kita, ada yang namanya Kartu Keluarga, yang dikepalai oleh kepala keluarga dari kaum lelaki),

Dunia pendidika tinggi juga tidak terlepas dari berbagai mithos gender yang bersifat *stereotyping*. Misalnya ada Fakultas Teknik di sebuah universitas ternama di Bandung yang memiliki dua jurusan, yaitu Jurusan Teknik Sipil dan Jurusan Arsitektur. Kebetulan universitas ini berlatar-belakang keagamaan yang sistem pendidikannya – pada masa lalu – menganut sistem segregasi (pemisahan) antara siswa dan siswi-nya, juga guru-guru serta kepala sekolahnya. Ketika siswa-siswi ini lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) lalu melanjutkan ke universitas tersebut, maka

sebagian besar lulusan SMA putera mendaftar ke Jurusan Teknik Sipil, sedangkan sebagian besar lulusan SMA puteri mendaftar ke Jurusan Arsitektur. Entah siapa yang membuat mithos bahwa bidang Teknik Sipil itu lebih cocok untuk kaum lelaki, sedangkan Arsitektur itu lebih sesuai untuk kaum perempuan. Mungkin asal-muasalnya dari mithos yang lebih tua, yaitu terkait dengan kompetensi matematika dan fisika. Karena ilmuwan² matematika dan fisika dari jaman Yunani kuno sampai jaman **Albert Einstein [1879 -1955]** hampir semuanya kaum lelaki – **Marie Cuurie [1867 - 1934]** hanya perkecualian yang langka – maka berkembanglah mithos bahwa hanya ada matematikawan dan fisikawan, tidak ada matematikawati dan fisikawati. Karena Jurusan Teknik Sipil memang lebih banyak menuntut kompetensi matematika dan fisika dibandingkan Jurusan Arsitektur, maka tidak heran jika kaum lelaki lebih banyak mendaftar ke Jurusan Teknik Sipil dibandingkan ke Jurusan Arsitektur, yang lebih banyak diminati kaum perempuan.

Di Fakultas Kedokteran juga ada mithos gender yang berdasarkan *stereotyping* kaum lelaki dan kaum perempuan. Misalnya dahulu ada semacam “larangan” atau “pantangan” kaum perempuan dokter untuk mengambil spesialisasi bedah, dengan alasan kaum perempuan dianggap mudah panik, tidak tenang, emosional, perasa dan tidak tega ketika melaksanakan pembedahan. Padahal alasan awalnya karena peralatan bedah waktu itu memang belum secanggih sekarang, bobotnya memang lebih sesuai digunakan oleh kaum lelaki. Sekarang ini mithos itu lambat-laun hilang, sehingga tidak sedikit kaum perempuan yang mengambil spesialisasi bedah, walau pun memang belum sebanyak kaum lelaki. Dulu pernah juga ada pantangan dokter perempuan mengambil spesialisasi kebidanan dan penyakit kandungan (*Obstetri* dan *Ginekologi*, atau *Obgin*, atau juga biasa disebut dokter kandungan) karena dikhawatirkan kaum perempuan akan mudah “terbawa perasaan”-nya ketika membantu persalinan, terutama kaum ibu. Mithos ini agak aneh dan kontradiktif, karena bidan yang membantu persalinan tidak ada dari kaum lelaki, sementara waktu itu semua dokter kandungan justru kaum lelaki. Tapi selama dua-tiga dekade terakhir terjadi perubahan. Karena alasan keagamaan, semakin banyak pasien *Obgin* yang hanya bersedia dibantu oleh dokter kandungan sesama kaumnya perempuan. Sekarang ini sudah semakin banyak dokter perempuan yang mengambil spesialisasi *Obgin*, mungkin suatu saat akan sama banyaknya atau bahkan lebih banyak dari dokter kandungan kaum lelaki.

REFERENSI

[1] **Vina Salviana D. Soedarwo dan Tutik Sulistyowati**, “*Sosiologi Gender*”, **Modul 1 – 9, SOSI4418**, Edisi 2, [November 2025], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta

[2] **Kemiskinan dan Diskriminasi Gender di Pedesaan:**

Agarwal, B. (1994). *A field of one's own: Gender and land rights in South Asia*.

Boserup, E. (1970). *Woman's role in economic development*.

Chant, S. (2003). Female household headship and the feminisation of poverty: Facts, fictions and forward strategies. *New Working Paper*

Kabeer, N. (1994). *Reversed realities: Gender hierarchies in development thought*.

Levien, M. (2017). *Gender and land dispossession: A comparative analysis*.

Meinzen-Dick, R., Quisumbing, A., Doss, C., & Theis, S. (2019). Women's land rights as a pathway to poverty reduction.

[3] Kaum Perempuan dan Politik:

Paxton, P., & Hughes, M. M. (2015). *Women, politics, and power: A global perspective*.

Burrell, B. C. (2004). *Women and political participation: A reference handbook*.

Lawless, J. L., & Fox, R. L. (2010). *It still takes a candidate*.

Burns, N., Schlozman, K. L., & Verba, S. (2001). *The private roots of public action*.

Blackburn, S. (2004). *Women and the state in modern Indonesia*.

[4] Mithos Gender di Dunia Pendidikan:

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1977). *Reproduction in education, society and culture*.

Oakley, A. (1972). *Sex, gender and society*.

Sadker, M., & Sadker, D. (1994). *Failing at fairness*.

Bourdieu, P. (2001). *Masculine domination*.

Suryakusuma, J. (2011). *State ibuisism: The social construction of womanhood in the Indonesian New Order*. Komunitas Bambu.

Giroux, H. A., & Penna, A. N. (1979). Social education in the classroom: The dynamics of the hidden curriculum. *Theory & Research in Social Education*, 7(1), 21–42.